

INDONESIA'S DEATH PENALTY PRACTICES ON NARCOTICS CRIME AND HOW IT AFFECTS EXTRADITION ARRANGEMENT

Author:

Audrey Kartisha Mokobombang¹ and Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.²

ABSTRACT

This study aims to analyze the exception of death penalty based on Law No. 1 of 1979 concerning Extradition and Indonesia's various bilateral agreements, as well as the impact of Indonesia's death penalty practices on narcotics crimes toward extradition.

Based on the normative-empirical method with qualitative data processing, this legal research combines literature studies on primary, secondary and tertiary legal materials analysis; with field studies through interviews with qualified sources from related fields.

This Legal Research argues that there is disharmony in regulating the principle of non-refoulement under Indonesia's extradition legal framework which creates challenges in its application, as well as conflicting situation between the practice of death penalty for narcotics crimes in Indonesia and guarantee of the right to life demanded from other states, which impacted extradition process as an international cooperation for criminal law enforcing means.

Keywords: Death Penalty Exception, Death Penalty on Narcotics Crime, Indonesian Extradition Law

¹ Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2017)

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

***PRAKTIK PIDANA MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN EKSTRADISI***

Oleh:

Audrey Kartisha Mokobombang³ dan Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.⁴

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengecualian pidana mati berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan berbagai perjanjian bilateralnya, serta praktik pidana mati pada kejahatan narkotika di Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan ekstradisi.

Berdasarkan metode normatif-empiris dengan pengolahan data kualitatif, penelitian hukum ini menggabungkan studi kepustakaan yang dilakukan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier; dengan studi lapangan melalui wawancara bersama narasumber dari bidang terkait.

Penelitian Hukum ini berpendapat bahwa terdapat ketidakharmonisan pengaturan prinsip non-refoulement dalam kerangka hukum ekstradisi di Indonesia yang menghasilkan tantangan dalam penerapannya, serta gesekan antara praktik pidana mati pada kejahatan narkotika di Indonesia dengan permintaan jaminan hak atas hidup dari negara lain, yang berdampak pada pelaksanaan ekstradisi sebagai kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: *Pengecualian Pidana Mati, Praktik Pidana Mati pada Kejahatan Narkotika, Peraturan Extradosis Indonesia*

³ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2017)

⁴ Dosen pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada